

## **Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung**

V Suci Wahyuni<sup>1</sup>

I Gede Cahyadi Putra<sup>2</sup>

I Ketut Sunarwijaya<sup>3</sup>

Universitas Mahasaraswati Denpasar

e-mail: Uchikajja@gmail.com

### **Abstract**

*The presence of the LPD in the village has enormous benefits for the economic life of the village community. The benefits obtained are being able to provide credit to villagers with relatively small interest, in the process of giving credit to prospective customers is flexible or not complicated, equalizing the economy in traditional villages, job creation, and the existence of LPD can maintain the development of traditional villages. This study aims to determine the effect of applying the principles of Good Corporate Governance on the performance of the Village Credit Institutions (LPD) in Kuta Selatan District, Badung Regency. Performance in this study was measured by a balance scorecard. The population in this study were all LPDs in South Kuta Subdistrict, found in 9 LPDs. The sampling technique in this study is the saturated sample technique or often referred to as the census. The respondents chosen in this study were 72 people consisting of chairpersons, employees and supervisory bodies, from each LPD in the South Kuta District. The data analysis method in this study uses multiple regression analysis to obtain a comprehensive picture of the effect of the variables of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness on performance using the SPSS program. Based on the results of hypothesis testing it is known that the principles of Good Corporate Governance: responsibility and fairness have a positive effect on LPD performance while transparency, accountability, independence has no effect on LPD performance*

**Keywords:** LPD Performance and Good Corporate Governance Principles

### **PENDAHULUAN**

Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dihasilkan oleh seorang pegawai diartikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kinerja merupakan terjemahan dari *performance* yang berarti Hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan). Menurut Mangkunegara (2001 :67), Kinerja adalah hasil kerja yang secara kualitas dan kuantitas yang telah dicapai oleh seorang karyawan atau pegawai dalam mengemban tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Yang dimaksud dengan kualitas di sini adalah dilihat dari segi kebersihan, kehalusan dan ketelitian dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya. Sedangkan, yang dimaksud dengan kuantitas itu dilihat dari banyaknya jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pegawai atau karyawan tersebut.

LPD adalah Lembaga Perkreditan Desa di Desa Pakraman dalam Wilayah Provinsi Bali yang oleh peraturan daerah (PERDA) diakui dan di kukuhkan dalam status hukum sebagai suatu bentuk badan usaha keuangan, dengan sifat yang bersifat khusus, karena hanya menyelenggarakan kegiatan usaha dalam wilayah desa, Nurjaya, dkk. (2001). Sebagai suatu lembaga perkreditan desa, LPD tentunya memiliki tujuan yang sama dengan lembaga perbankan lainnya yaitu untuk mencari keuntungan yang nantinya bisa di kelola untuk kepentingan warga desa. Menurut Suartana (2009:12), LPD merupakan lembaga keuangan milik desa pakraman yang telah berkembang, memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan budaya kepada anggotanya sehingga perlu dibina, di tingkatkan kinerjanya, diperkuat serta di lestarikan keberadaannya. Secara lebih luas menurut Nurjaya, dkk. (2011), pasal 2 ayat (1)

peraturan daerah tersebut menyatakan bahwa : LPD merupakan suatu badan usaha keuangan milik desa yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan desa dan untuk warga desa. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa LPD merupakan suatu bentuk lembaga ekonomi, yang oleh perda di akui dan di kukuhkan dalam status hukum sebagai suatu bentuk badan usaha keuangan, dengan sifat khusus, karena hanya menyelenggarakan kegiatan usaha dalam wilayah desa.

Menurut Hafiz (2000:40) Transparansi adalah “Keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintahan dalam sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan .”Sedangkan menurut Mardiasmo (2002:6), “transparansi yaitu keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat. Faktor Pertama yang mempengaruhi kinerja LPD adalah Transparansi. sesuatu hal yang nyata, jelas, dan terbuka serta dapat dipertanggung-jawabkan keberadaannya. Dalam hal ini kata transparansi sendiri lebih ditekankan sebagai sebuah bentuk tindakan / sikap yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap pihak atau orang lain yang berkepentingan pada sebuah hal yang mereka kerjakan. Didalam penulisan kali ini, saya akan membahas lebih spesifik lagi tentang transparansi yang berkaitan didalam dunia pemerintahan. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbale-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Suryani dan Rianti (2018) serta Kartika (2017) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara transparansi terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung. Sedangkan Bukhori (2012) menyatakan transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Faktor kedua yang mempengaruhi kinerja LPD adalah akuntabilitas. Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik tersebut antara lain (Hopwood dan Tomkins, 1984, Elwood, 1993 dalam Mahmudi (2011:19)): Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga- lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif Kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), kemampuan memberikan jawaban (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai ketidak bebasan (*liability*) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek dari administrasi publik atau pemerintahan, hal ini sebenarnya telah menjadi pusat-pusat diskusi yang terkait dengan tingkat problemabilitas di sektor publik, perusahaan nirlaba, yayasan dan perusahaan-perusahaan..

Faktor lainnya yang mempengaruhi kinerja LPD adalah Responsibilitas. Dwiyanto (2006:49) Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Responsibilitas dapat didefinisikan sebagai “bagian atau fakta memiliki tugas untuk menangani sesuatu atau memiliki kendali atas seseorang.” Atau “sesuatu yang merupakan tugas atau tugas Anda untuk ditangani” atau “memiliki tugas untuk bekerja atau membantu seseorang yang memiliki posisi otoritas atas Anda.” Karenanya, secara singkat, responsibilitas menyoroti perasaan memiliki tugas untuk menyelesaikan tugas. Karena itu, sesuatu yang ditugaskan kepada Anda, sering kali oleh seseorang yang memiliki wewenang atas Anda.

Faktor berikutnya berikutnya yang mempengaruhi kinerja LPD adalah Independensi. Independensi merupakan suatu sikap yang netral, tidak memihak atau berpihak kepada yang

lain dan bebas dari pengaruh. Mulyadi (2002:26), “Independensi adalah standar umum yang mengatur sikap mental independen auditor dalam menjalankan tugasnya. Independensi berarti sikap mental bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi adalah suatu keadaan atau posisi dimana kita tidak terikat dengan pihak manapun. Artinya keberadaan kita adalah mandiri.

Faktor terakhir yang mempengaruhi kinerja LPD adalah kewajaran. Menurut (Daniri, 2005:15) Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa berlaku adil dan berimbang terhadap kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. Kewajaran artinya perusahaan harus memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Kewajaran paling tepat dijabarkan dalam literatur dan persyaratan-persyaratan akuntansi profesional sebagai pernyataan netralitas dari akuntan dalam pembuatan laporan keuangan. Scott pada tahun 1941, menyatakan: “Aturan, prosedur, dan teknik akuntansi hendaknya wajar, tidak bias dan tidak memihak. Jadi salah satu dalil akuntansi dasar yang mendasari prinsip-prinsip akuntansi dapat dinyatakan sebagai kewajaran-kewajaran bagi seluruh segmen dari masyarakat bisnis (manajemen, tenaga kerja, pemegang saham, kreditor, konsumen, dan publik), ditentukan dan kebiasaan dari semua segmen tersebut sampai pada akhirnya semua prinsip-prinsip akuntansi yang didasarkan atas dalil di atas akan menghasilkan akuntansi keuangan bagi hak-hak dan kepentingan-kepentingan ekonomi yang telah diterbitkan secara resmi menjadi wajar untuk semua segmen. Suryani dan Rianti (2018) serta Kartika (2017) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara kewajaran terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung. Sedangkan Reny (2012) menyatakan bahwa kewajaran tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan/ kinerja LPD. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya peneliti ini melakukan penelitian kembali dengan bertemakan pengaruh prinsip-prinsip GCG.

### **TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kuta Selatan**

Transparansi menurut Purba (2012:24) adalah keterbukaan informasi dalam pengambilan keputusan maupun pengungkapan informasi yang material dan yang relevan dengan perusahaan. Selain itu transparansi menurut Mahmudi (2011:17) yaitu keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya public kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penanggungjawaban organisasi bisnis terhadap pihak yang berkepentingan. Mengetahui seluruh informasi secara benar dan terbuka dalam pengelolaan sumber daya merupakan salah satu hak *stakeholders*. Ini berarti transparan terhadap seluruh informasi harus diterapkan LPD guna memberikan kepercayaan bagi *stakeholders*. Keterbukaan dan kemudahan dalam menjadikan kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) menjadi lebih baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Setyawan dan Putri (2013) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di kecamatan Mengwi.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Transparansi berpengaruh positif terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Kuta Selatan

### **Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kuta Selatan**

Menurut mardiasmo (2009:20), akuntabilitas public adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk menerima pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban elemen perusahaan, salah satu prasyarat mencapai kinerja yang berkesinambungan adalah dengan mempertanggungjawabkan kinerjanya secara akuntabilitas benar, terukur, serta tetap memperhitungkan kepentingan pengelola dan *stakeholders* akan menjadi nilai tambah untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Menurut Bulandari dan Damayanthi (2015) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif terhadap akuntabilitas terhadap kinerja keuangan LPD di Kabupaten Badung. Sama halnya dengan penelitian Dewi dan Dwijayanti (2014) menyatakan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kedua yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H2 : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kuta Selatan

### **Pengaruh Responsibilitas terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kuta Selatan**

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi public ini dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh karena itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas. Menurut Setiawan (1988:9) "Responsibilitas berhubungan dengan penilaian atas kualitas pengelolaan dan kualitas pelaksanaan tugas atau operasi perusahaan. Untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat dan lingkungan, terlebih dahulu perusahaan harus mentaati peraturan perundang-undangan. Sikap dari perusahaan dalam mengelola usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan menjaga usaha dalam jangka panjang.

Responsibilitas diduga salah satu prinsip *good corporate governance* yang turut mempengaruhi Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Setyawan dan Putri (2013) menemukan bahwa ada pengaruh positif antara responsibilitas dengan kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Pradnyaswari dan Putri (2016) menyatakan bahwa responsibilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan koperasi di Kabupaten Klungkung.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis ketiga yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H3 : Responsibilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kuta Selatan

### **Pengaruh Independensi terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kuta Selatan**

Independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang auditor untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas (mayangsari sekar,2003). Setiap akuntan harus memelihara integritas dan objektivitas dalam tugas profesionalnya dan setiap auditor harus independensi dari semua kepentingan yang bertentangan atau pengaruh yang tidak layak. Sikap objektif akan memungkinkan para auditor melaksanakan audit dengan suatu cara, sehingga mereka akan sungguh-sungguh yakin atas pekerjaan dan hasil pekerjaannya Hiro Tugiman, (2006:25)

Keputusan yang diambil manajemen harus secara independen yang dalam hal ini berarti keputusan manajemen tidak terikat oleh pihak manapun tanpa terkecuali. Objektivitas dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan kinerja LPD karena, manajemen terbatas dari kepentingan pihak yang merugikan.

Menurut penelitian Dewi dan Dwijayanti (2014) menyatakan independensi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar. Bulandari dan Damayanthi (2015) menemukan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis keempat yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H4 : Independensi berpengaruh positif terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Kuta Selatan

### **Pengaruh Kewajaran terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kuta Selatan**

Kewajaran (Fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku. Good corporate governance pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. Good corporate governance dimasukkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki segera. Kewajaran dapat diartikan sebagai keadilan kesetaraan perusahaan dalam memenuhi kepentingan *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus senantiasa memperhatikan hak-hak para pemangku kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan kearah yang lebih baik.

Menurut penelitian Sari (2017) menyatakan bahwa kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung Utara. Pradnyaswari dan Putri (2016) juga menyatakan bahwa kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Koperasi di Kabupaten Klungkung.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kelima yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H5 : Kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kuta Selatan

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini berlokasi di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang ada di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Objek penelitian ini adalah prinsip-prinsip *good corporate governance* yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran serta kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang terdapat di Kecamatan Kuta Selatan.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua LPD di Kecamatan Kuta Selatan, terdapat di 9 LPD. Penentuan sampel dilakukan menggunakan *teknik sampel jenuh* atau sering disebut sebagai sensus. *teknik sampel jenuh* merupakan teknik penentuan yang menjadikan semua anggota menjadi populasi sebagai sampel.. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 72 orang yang terdiri dari ketua, pegawai dan badan pengawas, dari masing-masing LPD di Kecamatan Kuta Selatan.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji kelayakan model.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Analisis Linear Berganda**  
 Coefficient<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.001	4.526		2.872	.005
	TR	.114	.157	.064	.726	.470
	AK	.288	.252	.141	1.142	.258
	RP	.626	.249	.313	2.518	.014
	IN	-.284	.239	-.107	-1.192	.238
	KW	.726	.235	.401	3.088	.003

**Sumber: Lampiran 6**

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada Tabel 1 diatas maka diperoleh model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$KL = 13,001+0,114TR+0,288AK+0,626RP-0,284IN+0,726KW.....(2)$$

Keterangan:

- KNJ : Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD)
- TR : Keterbukaan/transparency
- AK : Akuntabilitas/accountability
- RP : Responsibilit/responsibility
- IN : Independensi/independency
- KW : Kewajaran/fairness

**Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja LPD pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung**

Berdasarkan uji regresi linear berganda diperoleh nilai koefisien regresi positif sebesar 0,114 dengan tingkat signifikansi variabel transparansi sebesar 0,470 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD dan dapat disimpulkan bahwa H<sub>1</sub> yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kuta Selatan dinyatakan ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan atau transparansi di dalam Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD. Hal ini disebabkan karena kinerja manajemen sudah mengikuti Standar Oprasional Prosedur (SOP) pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan SOP oleh manajemen menyebabkan ada atau tidaknya transparansi tidak mempengaruhi kinerja LPD. Karena ada atau tidaknya transparansi jika pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan SOP maka kinerja LPD akan tetap sama.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mahaendrayasa dan Dwija Putri (2017), Handayani, dkk, (2020) serta Yasinta Putri dan Dwiana Putra (2017) yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

**Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja LPD pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung**

Berdasarkan uji regresi linear berganda diperoleh nilai koefisien regresi positif sebesar 0,288 dengan tingkat signifikansi variabel akuntabilitas sebesar 0,258 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD dan dapat disimpulkan bahwa H<sub>2</sub> yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kuta Selatan dinyatakan ditolak. Hal ini

menjelaskan walaupun penerapan prinsip akuntabilitas dapat dikatakan cukup baik, nyatanya akuntabilitas tidak mempengaruhi kinerja LPD, hal ini di sebabkan dengan tujuan sasaran pembangunan LPD yaitu untuk mensejahterakan rakyat, maka dari itu pertanggungjawaban atau Akuntabilitas LPD tidak hanya dari Kinerja kariawannya melainkan juga dari masyarakat yang terlibat di desa tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Irmala (2010), Dian (2012), dan Suwarmika (2019) yang menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

#### **Pengaruh Responsibilitas terhadap Kinerja LPD pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung**

Berdasarkan uji regresi linear berganda diperoleh nilai koefisien regresi positif sebesar 0,626 dengan tingkat signifikansi variabel responsibilitas sebesar 0,014 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti responsibilitas berpengaruh positif terhadap kinerja LPD dan dapat disimpulkan bahwa  $H_3$  yang menyatakan bahwa responsibilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kuta Selatan dinyatakan diterima. Hasil penelitian tersebut menunjukkan apabila dalam pengelolaan LPD menerapkan prinsip responsibilitas yang berkaitan dengan pemahaman dan taat terhadap seluruh peraturan perundangan serta peraturan LPD yang berlaku maka kinerja Lembaga Perkreditan Desa akan semakin meningkat. Selain itu melaksanakan tanggung jawab kepada *stakeholders* serta peduli terhadap masyarakat atau krama desa dan kelestarian lingkungan juga akan meningkatkan kinerja Lembaga Perkreditan Desa tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Setyawan dan Putri (2013), Bulandari dan Damayanti (2014), Sandraningsih dan Dwija Putri (2015), Pradnyaswari dan Putri (2016), Sidney dan Sari (2016), Raka Suryani (2018) serta Lestari Putri (2019) yang menyatakan bahwa responsibilitas berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

#### **Pengaruh Independensi terhadap Kinerja LPD pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung**

Berdasarkan uji regresi linear berganda diperoleh nilai koefisien regresi positif sebesar -0,284 dengan tingkat signifikansi variabel independensi sebesar 0,238 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD dan dapat disimpulkan bahwa  $H_4$  yang menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kuta Selatan dinyatakan ditolak. Hal ini terjadi karena independensi artinya suatu keadaan atau posisi dimana kita tidak terikat dengan pihak manapun. Artinya keberadaan kita adalah mandiri, maka dalam hal ini prinsip GCG yaitu independensi tidak mempengaruhi kinerja LPD, karena karyawan saling membutuhkan satu sama lain, misalnya LPD membutuhkan badan pengawas, dan pengawasan dari masyarakat sekitar begitu pula masyarakat membutuhkan LPD, dan LPD berdiri karena adanya dukungan dari masyarakat sekitar.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Irmala (2010), Andriani (2016), dan Suwarmika (2019) yang menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

#### **Pengaruh Kewajaran terhadap Kinerja LPD pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung**

Berdasarkan uji regresi linear berganda diperoleh nilai koefisien regresi positif sebesar 0,726 dengan tingkat signifikansi variabel kewajaran sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja LPD dan dapat disimpulkan bahwa  $H_5$  yang menyatakan bahwa kewajaran berpengaruh positif terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kuta Selatan dinyatakan diterima. Hasil penelitian tersebut mengidentifikasikan bahwa penerapan prinsip kewajaran pada LPD sudah berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa jika dalam mengelola LPD pengurus LPD memberikan

perlakuan yang adil, setara dan wajar bagi semua anggota serta memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan bagi krama desa maka kinerja Lembaga Perkreditan Desa akan semakin meningkat. Selain itu pengelola memberikan kesempatan para krama desa/anggota LPD untuk memberikan masukan dan penyampaian pendapat bagi LPD juga akan meningkatkan kinerja Lembaga Perkreditan Desa tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Bulandari dan Damayanti (2014), Sandraningsih dan Dwija Putri (2015), Pradnyaswari dan Putri (2016), Sidney dan Sari (2016), Raka Suryani (2018), Tri, dkk, (2020) serta Lestari Putri (2019) yang menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kinerja LPD.

### SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh *Good Corporate Governance* yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 9 LPD yang berada di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung dengan mengambil 72 responden. Untuk menganalisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS.

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut: Transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung. Hal ini berarti bahwa semakin transparan Lembaga Perkreditan Desa dalam mengungkapkan informasinya, akan tidak signifikan meningkatkan kepercayaan *stakeholder* dalam hal ini krama desa terhadap pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas pada LPD dikatakan cukup baik tetapi masih belum dapat mendorong peningkatan kinerja LPD. Responsibilitas berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung. Hal ini berarti bahwa Lembaga Perkreditan Desa hendak terus menerapkan prinsip responsibilitas dengan penuh tanggung jawab dalam melayani nasabah, sehingga dapat mencapai kinerja yang lebih baik. Independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung. Hal ini dimungkinkan terjadi karena prinsip independensi dalam implementasinya belum diterapkan dengan baik sehingga menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan dengan kinerja LPD. Kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung. Hal ini berarti bahwa Lembaga Perkreditan Desa hendak menerapkan prinsip kewajaran dengan senantiasa memperhatikan hak semua pihak guna kinerja yang lebih baik kedepannya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainal. 2005. *Teori Keuangan dan Pasar Modal*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Ariani, I. G. A. P., Endiana, I. D. M., Arizona, I. P. E., & Kusuma, I. G. E. A. (2020). Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dan Filosofi Tri Hita Karana Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kota Denpasar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 2(3), 88-105.
- Astri, Furgani. 2014. Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Sumenep. *Jurnal Performance Bisnis & Akuntansi*.
- Barlian, R.S. 2003. *Manajemen Keuangan*. Edisi Kelima. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Literata Lintas Media.



- Budiati, Lilin. 2012. *Good Governance* dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Bukhori, Iqbal. 2012. Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI). *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Bulandari, I Gusti Agung Wita. 2015. Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung. *Skripsi*. Universitas Udaya.
- Cadbury Report. 1992. *Report of Commite on The Financial Aspects of Corporate Governance*. Great Britain: Gee.
- Dewi, Kadek Krismaya. 2014. Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar Bali. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Universitas Udayana.
- Dwijaputri, Asri. 2014. Pengaruh Kebijakan Deviden pada Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan CSR dan *Good Corporate Governance* sebagai Pemoderasi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI). 2001. *Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)*. Jakarta.
- Ghozali, H. Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gunawan, Ketut. 2011. Peran Falsafah Tri Hita Karana Bagi Prtumbuhan dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali. *Jurnal Analisis Manajemen*.
- Gunawan, Ketut. 2014. Peran Falsafah Tri Hita Karana Bagi Pertumbuhan dan Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali. *Jurnal Analisis Manajemen*.
- Hardikasari, Eka. 2011. Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan pada Industri Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2006-2008. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hill, C. W. I. and Thomas M.J. 1992. Stakeholder-Agency Theory. *Jurnal of Management Studies*.
- Ikhsan, Arfan. 2008. *Metodologi Penelitian Akuntansi Keprilakuan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Intan, Puspita Sari A.A. 2014. Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* pada Manajemen Laba. *E-Jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana.
- Irmala, Sari. 2010. Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perbankan Nasional (Studi pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2008) *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Jayanti, Ike Febriani. 2016. Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja (Studi Pada Karyawan PT Pos Indonesia (Persero) Tuban). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*.
- Jensen, M.C, and C.H. Smith. 1984. *The Modern Theory of Corporate*. *Journal of Financial and Economics*.
- Jensen, M.C., and W. H. Meckling. 1976. *Theory of The Firm: Manajerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure*. *Journal of Financial and Economics*.
- Komite Nasional Kebijakan *Governance*. 2006. Pedoman Umum Kebijakan *Good Corporate Governance* Indonesia.
- Nasution, Marihot dan Doddy Setiawan. 2007. Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia. SNA X Makasar.
- Oliver Hart. 1995. Corperate Governance: Some Theory and Implication. *The Economich Jurnal*.

- Pradnyaswari, Luh Gede Diah Ary. 2016. Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Kinerja Keuangan Koperasi di Kabupaten Klungkung. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.
- Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.
- Pertamawati, Ni Putu. 2009. Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam Mendorong Penggalan Dana Pembangunan Pedesaan di Provinsi Bali. *Sarathi*
- Purwani, Tri. 2010. Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan. *Majalah Ilmiah Informatika*.
- Rahayu, Sri. 2010. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan *Corporate Social Responsibilities* dan *Good Corporate Governance* sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Rahyuda. 2004. Metodologi Penelitian Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Reny, Dyah Retno M. 2012. Pengaruh Good Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2010. *Jurnal nominal*.
- Sandraningsih, Ni Kadek Budi. 2016. Pengaruh Prinsip *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Sari, Dek Ayu Meia Kartika. 2017. Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung Utara. *Skripsi*. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Setyawan, Komang Meitradi. 2013. Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*.
- Shleifer, Andrei & Vishny, Robert W., A. 1997. Survey of Corporate Governance. *Journal of Finance Volume*.
- Simamora, Henry. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Sri, Rahayu. 2010. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Suci, Y.F. 2013. Pengaruh Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan Pada PT. Kereta Api (Persero) Divisi Regional III Sumatera Selatan.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Shill, N. C. 2008. *Accounting for Good Corporate Governance*. JOAAG.
- Suartana, I Wayan. 2009. Arsitektur Pengelola Risiko pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Universitas Udayana.
- Suryandari, N. N. A., & Putra, G. B. B. (2020). Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem. Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA), 2(1), 11-21.

- Tri, I. G. A. A. E., Wati, B., Suryandari, N. N. A., & Putra, G. B. B. (2020). Implikasi GCG Dan Budaya Lokal Bali Terhadap Kinerja LPD. *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*, 10(1), 98-104.
- Thomas S Kaihatu. 2006. Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*.
- Utama, Made Suyana. 2016. *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Denpasar: CV Sartra Utama.
- Utari, Tri. 2016. Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan *Corporate Social Responsibilities* Terhadap *Effective Tax Ratio* Perusahaan. *Skripsi*. Universitas Mahasaraswati